

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses Islamisasi di Nusantara merupakan salah satu fase paling menentukan dalam sejarah perkembangan sosial dan kultural Indonesia. Islam hadir tidak melalui penaklukan militer, melainkan lebih banyak disebarkan melalui jaringan perdagangan internasional, hubungan kultural, serta dakwah damai para ulama dan mubalig dari Gujarat, Arab, dan Persia.¹ Jalur maritim terutama di pantai utara Jawa, Sumatra, hingga Maluku menjadi koridor penting yang menghubungkan pedagang Muslim dengan masyarakat pesisir Nusantara. Dari wilayah-wilayah tersebut, Islam kemudian menyebar ke pedalaman melalui interaksi ekonomi, perkawinan, dan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan surau.²

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Indonesia tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik setempat. Dalam konteks sejarah sosial, pola Islamisasi memperlihatkan adanya perbedaan antara pusat-pusat kekuasaan dan wilayah pesisir yang lebih terbuka. Di pusat kekuasaan seperti Demak, Banten, dan Cirebon, perkembangan Islam sangat didukung oleh legitimasi politik Kerajaan.³ Struktur politik ini membuat Islam tampil hegemonik dalam pembentukan hukum, budaya, dan tata sosial masyarakat. Namun, di daerah pesisir dan wilayah periferi, proses Islamisasi berlangsung lebih organik dan dialogis. Masyarakat pesisir yang kosmopolit dan terbuka terhadap pengaruh luar memungkinkan dakwah berkembang melalui negosiasi simbolik dan kultural tanpa dominasi institusi kekuasaan. Dengan demikian, Islamisasi di wilayah

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara* (Jakarta: Kencana, 2013), 17–20.

² M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (Stanford: Stanford University Press, 2008), 24.

³ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), 45.

pesisir tidak hanya merupakan ekspansi agama, tetapi juga proses adaptasi sosial dan kultural yang berakar pada kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, memandang Islamisasi hanya dari perspektif pusat kekuasaan akan menghasilkan pemahaman yang timpang dan parsial. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra, historiografi Islam Indonesia perlu diperluas dengan pendekatan sejarah mikro dan antropologi simbolik agar lebih peka terhadap variasi lokal.⁴ Pendekatan ini membantu kita memahami Islam bukan semata sebagai sistem doktrin normatif, melainkan sebagai realitas sosial yang hidup dan dinegosiasikan melalui simbol, ritual, dan struktur sosial masyarakat. Karena itu, studi terhadap wilayah periferi seperti pesisir selatan Jawa, termasuk Pangandaran, penting untuk memperkaya pemahaman tentang keragaman corak Islam Indonesia yang inklusif dan dinamis.

Dalam kerangka itulah, karakteristik masyarakat pesisir menjadi elemen penting untuk dipahami secara mendalam. Masyarakat pesisir di Nusantara memiliki karakter sosial yang khas. Ketergantungan ekonomi pada laut dan perdagangan membuat mereka memiliki watak terbuka, egaliter, serta mudah beradaptasi terhadap perubahan. Interaksi harian dengan pedagang dari berbagai etnis dan bangsa menjadikan masyarakat pesisir memiliki orientasi sosial yang plural dan kosmopolit.⁵ Dalam kondisi demikian, nilai-nilai Islam diterima secara natural melalui hubungan dagang, perkawinan, dan solidaritas sosial, bukan melalui paksaan politik. Ciri khas masyarakat pesisir juga tampak di wilayah selatan Jawa Barat seperti Pangandaran, di mana kehidupan komunitas nelayan berlangsung dalam tatanan sosial egaliter dengan sistem gotong royong yang kuat.⁶ Pola relasi sosial semacam ini menyediakan lahan subur bagi berkembangnya Islam yang akomodatif terhadap budaya lokal.

Keterbukaan sosial ini menjelaskan mengapa ulama lokal memainkan peran yang begitu sentral dalam proses Islamisasi di wilayah pesisir. Ulama

⁴ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 32.

⁵ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680* (New Haven: Yale University Press, 1993), 212–214.

⁶ BPS Kabupaten Pangandaran, *Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2023* (Pangandaran: BPS, 2023).

tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai penerjemah ajaran Islam agar selaras dengan kearifan lokal. Mereka menafsirkan nilai-nilai Islam melalui bahasa budaya setempat baik lewat tradisi lisan, seni, maupun ritual maritim sehingga Islam tidak hadir sebagai ajaran asing yang menghapus tradisi, melainkan sebagai sistem nilai yang berdialog dengan budaya lokal.⁷ Dengan cara ini, Islam tumbuh sebagai kekuatan moral yang membumi dan kontekstual. Ulama lokal sekaligus menjadi mediator sosial yang menjaga harmoni, menyelesaikan konflik, dan memperkuat solidaritas komunitas.

Selaras dengan itu, ruang-ruang sosial seperti pasar, pelabuhan, dan komunitas nelayan menjadi arena penting dalam penyebaran Islam. Proses Islamisasi di wilayah pesisir berlangsung secara organik melalui interaksi sosial sehari-hari. Dakwah Islam tidak sekadar diwujudkan dalam ceramah, tetapi juga dalam etika berdagang, kejujuran, dan teladan moral yang ditampilkan para ulama.⁸ Dengan cara demikian, Islam berkembang sebagai ajaran yang membumi dan melekat pada aktivitas sosial masyarakat. Model Islamisasi semacam ini melahirkan corak keberislaman yang khas lebih fleksibel, egaliter, dan terbuka terhadap pluralitas budaya dibandingkan Islam di pusat kekuasaan.

Jika ditarik ke konteks geografis, Pangandaran menjadi contoh nyata dari model Islamisasi organik tersebut. Sebagai wilayah pesisir selatan Jawa Barat, Pangandaran memiliki posisi geografis strategis yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Lokasi ini menjadikannya titik penting dalam jaringan perdagangan dan perlintasan budaya sejak masa pra-kolonial.⁹ Sebagai pelabuhan alam, Pangandaran telah lama menjadi tempat persinggahan kapal pedagang dari Arab, Gujarat, dan Timur Tengah sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke daerah lain di Nusantara. Melalui interaksi di pelabuhan dan pasar tradisional, ajaran Islam diperkenalkan secara bertahap kepada masyarakat setempat. Pola ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Pangandaran berlangsung

⁷ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 12–14.

⁸ Nurhadi, "Otoritas Ulama Pesisir Banten," *Jurnal Sosiologi Agama* 8, no. 1 (2020): 55.

⁹ Balai Arkeologi Jawa Barat, *Laporan Penelitian Situs Pesisir Selatan Jawa Barat* (Bandung: Kemdikbud, 2019).

secara damai, berbasis pada relasi ekonomi dan kultural, bukan dominasi politik.

Kondisi historis ini diperkuat oleh keberlanjutan tradisi keagamaan yang masih lestari hingga kini. Keberadaan ulama kampung atau ajengan berperan besar dalam menjaga kesinambungan ajaran Islam sekaligus memelihara tradisi lokal.¹⁰ Praktik keagamaan seperti tahlilan, pengajian rutin, ziarah kubur, dan tradisi maritim seperti *nadran laut* menjadi manifestasi Islam yang membaaur dengan budaya pesisir. Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa Islam di Pangandaran tidak hadir untuk menyingkirkan budaya lama, melainkan memberi makna religius baru terhadap praktik budaya yang telah mengakar. Dengan demikian, ulama lokal berfungsi sebagai agen simbolik yang menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal secara bersamaan.

Namun demikian, kekayaan tradisi dan sejarah keagamaan Pangandaran belum banyak mendapat perhatian akademik. Sebagian besar penelitian Islamisasi di Indonesia masih berfokus pada pusat-pusat Islam klasik seperti Banten, Cirebon, dan Demak.¹¹ Padahal, wilayah pesisir selatan seperti Pangandaran memiliki dinamika sosial-keagamaan yang unik dan penting untuk dipahami. Kekosongan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dalam historiografi Islam Indonesia, khususnya mengenai peran ulama pesisir sebagai aktor simbolik yang menggerakkan proses Islamisasi dari bawah (*bottom-up*). Oleh karena itu, Pangandaran relevan dijadikan locus penelitian untuk memahami konstruksi modal simbolik dan otoritas keagamaan ulama lokal dalam masyarakat pesisir.

Beranjak dari konteks tersebut, penting untuk meninjau peran ulama lokal dalam kerangka teoritis yang lebih luas. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, ulama lokal menempati posisi strategis sebagai aktor simbolik. Mereka bukan hanya guru agama, tetapi juga pemimpin spiritual dan mediator sosial yang menjaga keseimbangan komunitas. Otoritas mereka tidak

¹⁰ Rahmawati, "Ulama Kampung dan Tradisi Keagamaan Pesisir Jawa Tengah," *Al-Daulah: Jurnal Kajian Politik Islam* 12, no. 2 (2023): 88.

¹¹ Zulkifli, "Islamisasi di Sumatera Barat: Perspektif Dakwah Kultural," *Studia Islamika* 29, no. 3 (2022): 357.

bersumber dari kekuasaan formal, melainkan dari pengakuan sosial yang diberikan masyarakat atas kesalahan pribadi, nasab keagamaan, kedalaman ilmu, dan keterlibatan sosial.¹² Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pengakuan tersebut merupakan bentuk modal simbolik yakni kekuasaan yang lahir dari legitimasi sosial terhadap atribut yang dianggap bernilai tinggi secara budaya.¹³ Modal simbolik ini menjadi dasar bagi terbentuknya otoritas keagamaan ulama lokal, karena masyarakat menilai mereka bukan dari status formal, melainkan dari reputasi moral dan karisma spiritual yang melekat.

Teori habitus dari Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana disposisi religius para ulama terbentuk melalui pengalaman sosialnya. Habitus lahir dari proses panjang pendidikan di pesantren, praktik spiritual, dan interaksi sosial dengan komunitas pesisir. Habitus ini membentuk cara berpikir, bertindak, dan menafsirkan ajaran Islam secara kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁴ Dalam arena sosial yang dinamis, ulama bernegosiasi dengan aktor lain seperti tokoh adat, pemimpin komunitas, maupun aparat local untuk mempertahankan otoritas dan legitimasi keagamaannya. Otoritas ini kemudian diperkuat dengan konsep Max Weber tentang tiga bentuk legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional di mana ulama pesisir cenderung menggabungkan unsur tradisional dan karismatik.¹⁵

Dengan menggabungkan kedua kerangka teori tersebut, penelitian ini menawarkan analisis yang komprehensif terhadap konstruksi otoritas keagamaan ulama lokal di Pangandaran. Konsep *modal simbolik*, *habitus*, dan *arena sosial* Bourdieu diintegrasikan dengan tipologi otoritas Weber untuk menjelaskan bagaimana ulama memperoleh, mempertahankan, dan mereproduksi otoritas keagamaannya di tengah masyarakat pesisir. Otoritas tersebut tidak lahir secara struktural, melainkan dibangun melalui pengakuan sosial, simbol keagamaan, serta praktik hidup yang berakar pada budaya lokal.

¹² Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital* (New York: Greenwood, 1986), 248.

¹³ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 82.

¹⁴ Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), 215–218.

¹⁵ Fauzi, “Modal Simbolik Ulama Pesisir Jawa Timur,” *Al-Afkar* 12, no. 1 (2024): 41.

Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat pesisir Pangandaran memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan masyarakat agraris di wilayah pedalaman. Kehidupan yang bergantung pada aktivitas kelautan, perikanan, dan perdagangan membentuk pola interaksi sosial yang relatif terbuka terhadap pengaruh dari luar. Keterbukaan tersebut mendorong terjadinya pertukaran budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai keagamaan yang berlangsung secara dinamis. Di sisi lain, masyarakat pesisir tetap mempertahankan berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Tradisi seperti hajat laut, ziarah makam tokoh agama, pengajian kampung, dan berbagai bentuk ritual sosial lainnya menunjukkan adanya hubungan erat antara kehidupan keagamaan dan budaya lokal yang berkembang di wilayah Pangandaran.

Dari perspektif historis, proses Islamisasi di Pangandaran tidak dapat dilepaskan dari posisi wilayah ini sebagai bagian dari jalur perlintasan maritim di pesisir selatan Jawa. Melalui jaringan perdagangan dan mobilitas penduduk antardaerah, berbagai ajaran dan praktik keislaman mulai diperkenalkan kepada masyarakat setempat. Berbeda dengan wilayah yang mengalami Islamisasi melalui dukungan kekuasaan politik kerajaan, proses Islamisasi di Pangandaran berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial, pendidikan keagamaan, keteladanan tokoh agama, dan adaptasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Pola tersebut menghasilkan corak keberagamaan yang bersifat akomodatif, di mana nilai-nilai Islam dapat diterima tanpa harus menghilangkan tradisi yang telah hidup sebelumnya dalam masyarakat.

Dalam proses tersebut, keberadaan ulama lokal menjadi faktor yang sangat penting. Ulama lokal dalam penelitian ini dipahami sebagai tokoh agama yang memperoleh pengakuan dan legitimasi dari masyarakat setempat karena keilmuan, kesalehan, keteladanan moral, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbeda dengan otoritas keagamaan yang bersumber dari lembaga formal atau struktur birokrasi keagamaan, ulama lokal memperoleh pengaruhnya melalui hubungan sosial yang dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut menjadikan ulama tidak hanya berfungsi

sebagai pengajar agama, tetapi sekaligus sebagai penengah konflik, penjaga tradisi, pemimpin spiritual, dan rujukan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

Keberhasilan ulama lokal dalam mempertahankan pengaruh keagamaannya tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui aspek keilmuan agama. Dalam banyak kasus, masyarakat memberikan penghormatan dan kepercayaan kepada ulama karena adanya atribut simbolik tertentu yang dianggap memiliki nilai dan makna sosial yang tinggi. Atribut tersebut dapat berupa garis keturunan keagamaan, reputasi kesalehan, kedalaman ilmu, kharisma personal, maupun kontribusi sosial yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, untuk memahami posisi ulama dalam masyarakat pesisir Pangandaran diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat dimensi normatif agama, tetapi juga dimensi simbolik yang membentuk legitimasi sosial mereka.

Dalam kerangka inilah konsep otoritas simbolik menjadi relevan digunakan. Otoritas simbolik merujuk pada kemampuan seseorang untuk memperoleh pengakuan, kepercayaan, dan kepatuhan dari masyarakat melalui simbol-simbol yang dianggap sah dan bernilai oleh komunitas sosial tertentu. Otoritas tersebut tidak dibangun melalui kekuasaan koersif maupun jabatan formal, melainkan melalui proses pengakuan kolektif yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai modal simbolik dan otoritas keagamaan ulama lokal menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana para ulama di Pangandaran mampu membangun, mempertahankan, dan mereproduksi pengaruh keagamaannya dalam proses Islamisasi masyarakat pesisir.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tentang Islamisasi di wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Kajian-kajian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Anwar (2019) di Madura, Nurhadi (2020) di Banten, dan Fauzi (2024) di Jawa Timur, menegaskan pentingnya peran ulama lokal dalam Islamisasi, tetapi belum ada

yang secara khusus menyoroti Pangandaran.¹⁶ Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji konstruksi modal simbolik dan otoritas keagamaan ulama lokal sebagai proses simbolik yang menegosiasikan nilai Islam dan budaya maritim masyarakat Pangandaran.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan kultural yang luas. Secara akademis, penelitian ini memperluas kajian sosiologi agama dan antropologi Islam dengan menekankan dimensi simbolik dan kultural Islamisasi. Melalui pendekatan etnografi simbolik, penelitian ini berusaha menafsirkan makna tindakan, ritual, dan interaksi sosial ulama lokal dalam konteks masyarakat pesisir. Dari sisi kultural, penelitian ini berpotensi memperkuat identitas keislaman masyarakat Pangandaran yang akomodatif, moderat, dan berakar pada tradisi lokal. Islamisasi yang tumbuh secara organik di wilayah ini mencerminkan wajah Islam Nusantara yang ramah budaya, terbuka, dan inklusif. Temuan penelitian ini diharapkan memperkaya wacana keislaman nasional yang menegaskan pentingnya peran ulama lokal sebagai penjaga keseimbangan antara agama dan budaya di tingkat akar rumput.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diambil berdasar pada latar belakang diatas sehingga setelah itu peneliti membagi kedalam tiga fokus utama permasalahan yang akan di uraikan pada hasil penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana konstruksi modal simbolik ulama lokal dalam proses Islamisasi masyarakat pesisir Pangandaran?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan, legitimasi, dan reproduksi otoritas keagamaan ulama lokal di tengah masyarakat pesisir Pangandaran?
3. Bagaimana strategi simbolik dan praktik keagamaan ulama lokal dalam memperkuat proses Islamisasi masyarakat pesisir Pangandaran?

¹⁶ Anwar, "Peran Kiai Madura dalam Islamisasi Pesisir," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 2 (2019): 97.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah difokuskan sebelumnya, oleh karenanya tujuan dari dibuatnya penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

1. Menganalisis bentuk dan struktur modal simbolik yang membentuk legitimasi sosial ulama lokal dalam sejarah Islamisasi Pangandaran.
2. Menelaah mekanisme dan dinamika terbentuknya otoritas keagamaan ulama lokal dalam konteks sosial-budaya masyarakat pesisir.
3. Menginterpretasikan strategi simbolik dan praksis dakwah yang digunakan ulama lokal dalam memperkuat dan mereproduksi pengaruh keagamaannya di masyarakat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik, praktis, dan sosial. Dengan mengkaji konstruksi modal simbolik dan otoritas keagamaan ulama lokal dalam proses Islamisasi masyarakat pesisir Pangandaran, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, budaya, dan struktur sosial dalam masyarakat lokal.

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian sosiologi agama, antropologi Islam, dan studi Islam lokal, khususnya yang berkaitan dengan modal simbolik, otoritas keagamaan, dan proses Islamisasi. Penelitian ini memperluas penerapan teori Pierre Bourdieu mengenai habitus, modal simbolik, dan arena sosial dalam konteks masyarakat pesisir, serta memperkaya pemahaman mengenai pembentukan dan reproduksi otoritas keagamaan ulama lokal dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Islamisasi di Indonesia dengan menunjukkan bahwa proses penyebaran dan penguatan nilai-nilai Islam tidak hanya berlangsung melalui institusi formal dan pusat kekuasaan, tetapi juga melalui mekanisme sosial, budaya, dan simbolik yang berkembang pada tingkat lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara agama, budaya, dan masyarakat dalam perspektif interdisipliner.

Lebih lanjut, penelitian ini mempertegas pentingnya pendekatan sejarah mikro dan kajian lokal dalam memahami keragaman praktik keislaman di Indonesia. Dengan menempatkan Pangandaran sebagai locus penelitian, studi ini berupaya mengisi kesenjangan literatur mengenai peran ulama lokal dalam Islamisasi masyarakat pesisir yang selama ini masih relatif terbatas dalam kajian akademik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga dakwah, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dalam merumuskan program pembinaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan. Temuan mengenai peran ulama lokal sebagai agen sosial dan keagamaan dapat dimanfaatkan dalam penguatan pembangunan sosial, pendidikan karakter, serta pembinaan kehidupan keagamaan yang moderat dan inklusif.

Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam upaya pelestarian tradisi keagamaan dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat pesisir. Dengan memahami mekanisme pembentukan otoritas keagamaan dan pengaruh simbolik ulama lokal, para pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

3. Kegunaan Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Pangandaran dalam memahami kembali sejarah, tradisi, dan dinamika keagamaan yang berkembang di lingkungan mereka. Kajian ini dapat memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran ulama lokal dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam, harmoni sosial, serta identitas budaya masyarakat pesisir.

Bagi generasi muda, penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan mengenai warisan keagamaan lokal yang memiliki relevansi dengan kehidupan kontemporer. Dengan demikian, nilai-nilai keislaman yang berkembang dalam tradisi masyarakat pesisir dapat terus dipelihara dan diwariskan secara berkelanjutan sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Pangandaran.

E. Kerangka Berpikir

Agama dalam perspektif sosiologis dan antropologis tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan ajaran normatif, melainkan sebagai sistem simbolik yang berfungsi membentuk struktur sosial dan identitas kolektif masyarakat. Sebagai sistem simbolik, agama memproduksi seperangkat nilai, makna, dan praktik yang menghubungkan individu dengan komunitasnya melalui mekanisme simbolik yang menata tindakan sosial. Dalam konteks masyarakat pesisir, Islam tidak hadir sebagai doktrin yang statis, tetapi sebagai praktik kultural yang terus bernegosiasi dengan tradisi lokal, beradaptasi dengan struktur sosial, dan berperan aktif dalam pembentukan tatanan sosial yang dinamis.¹⁷ Dengan demikian, keberagaman di wilayah pesisir dapat dipahami sebagai hasil interaksi dialektis antara ajaran Islam dan budaya lokal yang terus berlangsung.

¹⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87–90.

Untuk menjelaskan relasi simbolik tersebut, kerangka teori Pierre Bourdieu menjadi dasar konseptual utama dalam penelitian ini. Konsep *modal simbolik* menjelaskan bahwa kekuasaan keagamaan tidak selalu bersumber dari struktur formal, tetapi dari pengakuan sosial terhadap atribut-atribut yang bernilai tinggi secara kultural, seperti nasab, kesalehan, keilmuan, dan keterlibatan sosial.¹⁸ Dalam konteks ulama lokal Pangandaran, modal simbolik berperan sebagai basis legitimasi sosial yang menopang posisi mereka dalam masyarakat. Otoritas ulama tidak dibentuk melalui jabatan institusional, melainkan melalui akumulasi dan distribusi pengakuan simbolik yang diperoleh dari reputasi moral, kedalaman ilmu, serta partisipasi sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Selain itu, konsep habitus memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana disposisi religius dan sosial ulama terbentuk melalui pengalaman panjang yang terinternalisasi.¹⁹ Habitus ulama lokal tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses sosialisasi yang panjang di pesantren, praktik spiritual yang konsisten, serta interaksi intensif dengan komunitas pesisir. Disposisi ini membentuk pola berpikir dan bertindak ulama dalam menafsirkan serta mengartikulasikan ajaran Islam agar selaras dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, habitus berfungsi sebagai mekanisme reproduksi simbolik yang memungkinkan ulama mempertahankan otoritasnya sekaligus menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan konteks budaya setempat.

Lebih lanjut, konsep arena sosial (*field*) dalam kerangka Bourdieu memberikan ruang analitis untuk memahami dinamika kekuasaan dan negosiasi simbolik di masyarakat. Arena sosial merupakan ruang interaksi tempat aktor-aktor bersaing dan bernegosiasi untuk memperoleh pengaruh dan legitimasi.²⁰ Dalam konteks masyarakat pesisir Pangandaran, arena ini mencakup ruang

¹⁸ Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital* (New York: Greenwood Press, 1986), 243–248.

¹⁹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 72–76.

²⁰ Pierre Bourdieu dan Loïc Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 97–100.

dakwah, ritual keagamaan, kegiatan adat maritim, serta aktivitas sosial yang menjadi wadah bagi reproduksi nilai-nilai Islam. Di dalam arena tersebut, ulama lokal berperan tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai mediator sosial yang bersaing sekaligus berkolaborasi dengan tokoh adat, aparat desa, dan pemimpin komunitas lainnya. Proses ini memperlihatkan bahwa otoritas ulama merupakan hasil negosiasi sosial yang terus diperbarui, bukan status yang diberikan secara otomatis oleh struktur sosial.

Kerangka berpikir ini kemudian diperkuat oleh tipologi otoritas Max Weber, yang membedakan tiga bentuk otoritas, yakni tradisional, legal-rasional, dan karismatik.²¹ Dalam konteks ulama lokal di Pangandaran, otoritas mereka cenderung merupakan kombinasi antara otoritas tradisional dan karismatik. Otoritas tradisional berakar pada legitimasi genealogis dan warisan budaya keagamaan, sedangkan otoritas karismatik lahir dari kesalehan, reputasi moral, serta kharisma spiritual yang diakui oleh masyarakat. Kombinasi keduanya memungkinkan ulama untuk memperoleh kepercayaan tanpa harus mengandalkan legitimasi formal dari negara atau lembaga keagamaan. Dengan demikian, otoritas ulama lokal merupakan hasil dialektika antara struktur sosial, simbol keagamaan, dan pengalaman spiritual.

Dengan seluruh kerangka tersebut, Islamisasi di Pangandaran dapat dipahami sebagai proses sosial-simbolik yang berlangsung secara organik dan partisipatif. Islamisasi tidak semata dipahami sebagai penyebaran ajaran secara historis, tetapi sebagai arena interaksi antara agama, budaya, dan agen sosial keagamaan. Melalui akumulasi *modal simbolik*, pembentukan *habitus*, dan keterlibatan dalam *arena sosial*, ulama lokal membangun dan mempertahankan otoritas keagamaannya di tengah masyarakat pesisir. Integrasi antara teori Bourdieu dan Weber dalam konteks ini memberikan fondasi analitis yang kuat untuk menjelaskan bahwa otoritas keagamaan ulama lokal merupakan konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui pengakuan simbolik dan

²¹ Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), 215–218.

praktik budaya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap mekanisme simbolik yang melandasi legitimasi dan pengaruh ulama lokal dalam Islamisasi masyarakat pesisir Pangandaran.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai Islamisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus dari narasi besar yang menekankan peran kerajaan Islam klasik menuju studi yang lebih menyoroti dimensi lokal, sosial, dan kultural. Salah satunya penelitian Anwar (2019) yang membahas peran kiai di Madura. Studi ini memperlihatkan bagaimana Islamisasi di pesisir tidak berlangsung melalui struktur politik formal, melainkan lewat peran ulama kampung yang menjadi mediator antara ajaran Islam dan tradisi maritim. Kiai lokal dipandang bukan sekadar guru agama, melainkan figur simbolik yang mengintegrasikan etika Islam ke dalam praktik sosial masyarakat nelayan, sehingga Islam diterima secara organik tanpa menimbulkan resistensi budaya.²²

Selanjutnya, penelitian Nurhadi (2020) di Banten menyoroti otoritas ulama dari perspektif sosial-budaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa legitimasi ulama di daerah pesisir bukan hanya didasarkan pada nasab keilmuan, tetapi juga pada keterampilan mereka dalam menjaga harmoni sosial melalui pendekatan budaya. Ulama terbukti memainkan peran strategis dalam meredam konflik sosial dan menjadi rujukan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa otoritas keagamaan ulama merupakan konstruksi sosial yang lahir dari pengakuan kolektif, bukan sekadar warisan genealogis.²³

Penelitian Yusup (2021) di Cirebon memberikan perspektif baru tentang bagaimana habitus pesantren membentuk pola kepemimpinan ulama.

²² Ahmad Anwar, "Islamisasi dan Peran Kiai Pesisir di Madura: Studi tentang Integrasi Tradisi Maritim dan Dakwah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 2 (2019): 145–162.

²³ Muhammad Nurhadi, "Legitimasi Otoritas Keagamaan Ulama di Banten: Perspektif Budaya dan Sosial," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 33–50.

Habitus yang diperoleh melalui pendidikan panjang di pesantren menjadikan ulama memiliki karakter khas dalam kepemimpinan keagamaan, yaitu kesederhanaan, kedekatan dengan masyarakat, serta ketekunan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam. Temuan ini menegaskan relevansi teori Pierre Bourdieu mengenai habitus sebagai modal simbolik yang menentukan penerimaan ulama oleh komunitasnya.²⁴

Zulkifli (2022) meneliti proses Islamisasi di pesisir Sumatra Barat melalui pendekatan dakwah kultural. Ia menemukan bahwa Islam diterima oleh masyarakat setempat bukan dengan cara menggantikan tradisi, melainkan dengan mengislamkan praktik budaya yang sudah ada. Misalnya, ritual maritim dan upacara adat tetap dipertahankan, tetapi diberi muatan keislaman. Strategi ini menunjukkan bahwa Islamisasi di daerah pesisir berlangsung lewat negosiasi simbolik antara agama dan budaya, bukan konfrontasi.²⁵

Rahmawati (2023) meneliti ulama kampung di Jawa Tengah dan menemukan bahwa otoritas mereka sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Ulama tidak hanya berperan dalam pengajian atau khutbah, melainkan juga dalam kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, pengelolaan konflik keluarga, hingga pendampingan sosial. Modal simbolik berupa kesalehan pribadi, karisma, dan kedekatan emosional dengan masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat legitimasi ulama kampung.²⁶

Penelitian Fauzi (2024) di Jawa Timur mengungkapkan bahwa ulama pesisir memiliki otoritas ganda, yaitu otoritas tradisional yang bersumber dari legitimasi genealogis dan otoritas karismatik yang lahir dari reputasi moral. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islamisasi di pesisir berlangsung secara

²⁴ Asep Yusup, "Habitus Ulama Pesantren dan Kepemimpinan Keagamaan di Cirebon," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2021): 201–220.

²⁵ Zulkifli, "Islamisasi dan Dakwah Kultural di Pesisir Sumatra Barat," *Jurnal Al-Turas* 28, no. 3 (2022): 411–430.

²⁶ Siti Rahmawati, "Ulama Kampung dan Konstruksi Otoritas Keagamaan di Jawa Tengah," *Jurnal Studi Islam Lokal* 5, no. 1 (2023): 77–95.

inklusif, karena ulama menjadi mediator antara tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memperlihatkan Islam sebagai agama yang mampu berdialog dengan budaya setempat tanpa kehilangan substansi ajarannya.²⁷

Selain penelitian-penelitian tersebut, ada juga kajian oleh Mansur (2019) mengenai Islamisasi di pesisir Aceh. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam masuk ke Aceh melalui jalur perdagangan internasional dan peran ulama lokal yang menyesuaikan ajaran Islam dengan adat setempat. Ulama berperan dalam menciptakan sistem sosial yang lebih egaliter, di mana norma agama dan adat hidup berdampingan.²⁸

Penelitian Hidayat (2020) di Lombok menunjukkan bahwa dakwah kultural melalui tradisi lokal seperti *roah* dan *ziarah kubur* menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi ulama di masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana ulama memanfaatkan simbol-simbol lokal untuk memperluas pengaruh keagamaan, sehingga Islam diterima secara lebih membumi.²⁹

Dalam konteks lain, studi Kurniawan (2021) mengenai Islamisasi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa ulama lokal berperan sebagai agen transformasi sosial, terutama dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Ulama dianggap sebagai figur yang mampu menegosiasikan nilai-nilai agama dengan perkembangan sosial-ekonomi, sehingga mereka tetap relevan di tengah arus perubahan zaman.³⁰

Terakhir, penelitian oleh Fadli (2022) di pesisir Sulawesi Selatan menegaskan bahwa Islamisasi berlangsung melalui jalur pendidikan tradisional. Ulama lokal yang mendirikan surau dan pesantren kecil memainkan peran

²⁷ Ahmad Fauzi, "Modal Simbolik dan Otoritas Ulama Pesisir Selatan Jawa Timur," *Jurnal Antropologi Agama* 12, no. 2 (2024): 121–140.

²⁸ Abdullah Mansur, "Islamisasi Awal di Aceh dan Peran Ulama Lokal," *Jurnal Sejarah Islam Nusantara* 3, no. 1 (2019): 55–72.

²⁹ Ahmad Hidayat, "Dakwah Kultural dan Tradisi Lokal di Lombok: Peran Ulama dalam Islamisasi," *Jurnal Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2020): 188–205.

³⁰ Dedi Kurniawan, "Ulama Lokal dan Transformasi Sosial di Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (2021): 245–263.

sentral dalam menyebarkan Islam. Penelitian ini memperlihatkan bahwa modal simbolik berupa penguasaan ilmu agama dan kemampuan mendidik generasi muda menjadi kunci utama otoritas keagamaan mereka.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian lima tahun terakhir semakin menekankan peran ulama lokal, modal simbolik, dan strategi dakwah kultural dalam proses Islamisasi di wilayah pesisir. Namun, secara khusus kajian mengenai ulama di Pangandaran masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti bagaimana ulama lokal di Pangandaran membangun otoritas keagamaan mereka melalui modal simbolik, habitus, dan praktik sosial budaya masyarakat pesisir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal mengenai alasan pentingnya penelitian dilakukan, arah penelitian, serta kontribusinya terhadap kajian akademis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian teoritis yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep modal simbolik ulama lokal, otoritas keagamaan, peran sosial-religius ulama, proses Islamisasi dan dakwah kultural, serta teori habitus dan arena sosial. Pada bagian ini juga dijelaskan keterkaitan antara teori yang digunakan dengan fokus penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

³¹ M. Fadli, "Peran Ulama Lokal dalam Pendidikan dan Islamisasi di Sulawesi Selatan," *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* 6, no. 2 (2022): 134–152.

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Bab ini bertujuan memberikan kejelasan prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data lapangan yang diperoleh, meliputi konstruksi modal simbolik ulama lokal, otoritas keagamaan yang terbentuk, serta strategi dakwah dan praktik sosial-keagamaan. Selain itu, bab ini juga berisi analisis dan pembahasan hasil temuan dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian yang ditemui selama proses pelaksanaan, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.